

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 2, Juni 2017

ISSN 0853-9316

- PENERAPAN DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI YOGYAKARTA
oleh: Venty Eka Setya
- ANALISIS DYA SAING KOMODITAS PERTANIAN DAN BAHAN PANGAN INDONESIA DI PASAR KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM
oleh: Iwan Hermawan
- KEBIJAKAN PENYALURAN MODAL MELALUI KOPERASI BERBASIS PEMBELAJARAN KOMUNITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA
oleh: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi
- MENGEVALUASI DAN MENGINVENTARISASI PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
oleh: Joko Riskiono
- PEMBARUAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN
oleh: Harris Y. P. Sibuea
- PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN SEBUAH TELAAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA
oleh: Handarini Ardiyanti



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 1, Juni 2017

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
● PENERAPAN DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI YOGYAKARTA <i>oleh: Venty Eka Setya</i>	85-97
● ANALISIS DYA SAING KOMODITAS PERTANIAN DAN BAHAN PANGAN INDONESIA DI PASAR KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM <i>oleh: Iwan Hermawan</i>	99-115
● KEBIJAKAN PENYALURAN MODAL MELALUI KOPERASI BERBASIS PEMBELAJARAN KOMUNITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA <i>oleh: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi</i>	117-127
● MENGEVALUASI DAN MENGINVENTARISASI PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL <i>oleh: Joko Riskiono</i>	129-149
● PEMBARUAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN <i>oleh: Harris Y. P. Sibuea</i>	151-162
● PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN SEBUAH TELAHAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA <i>oleh: Handarini Ardiyanti</i>	153-179

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Edisi Juni 2017. Berbagai isu yang disajikan dalam Edisi Juni ini sangat beragam, baik bidang hukum, kebudayaan maupun ekonomi. Terdapat enam tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan para penulis baik dari internal maupun penulis dari luar Pusat Penelitian.

Tulisan pertama berjudul “Penerapan Dan Perspektif Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Di Yogyakarta”, yang ditulis oleh Venti Eka Satya. Artikel ini mengulas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). Laporan keuangan Daerah DI Yogyakarta (DIY) telah lima kali berturut-turut (2011-2015) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Daerah DIY pada tahun 2015 memperoleh nilai tertinggi (80,68) dengan predikat A. Aparat pengawasan intern pemerintah DIY juga berada pada level maturitas 3. Indonesia. Pemda DIY sudah merintis pelaksanaan sistem pengendalian intern sejak 2005. Pengendalian internal pemerintah daerah sudah menjadi komitmen Gubernur DIY sejak mencanangkan Reformasi Total pada 1998/1999. Pemerintah DIY sangat memahami pentingnya SPIP. Pemerintah DIY menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa aturan turunan yang relevan. Pemda DIY telah berhasil menerapkan SPIP di lingkungan organisasinya hal ini terlihat dari nilai LAKIP, opini atas Laporan Keuangan serta jawaban kuesioner dari penerliti. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SPIP adalah rendahnya kompetensi SDM dan kurangnya komitmen terhadap kompetensi SDM; kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SPIP dan belum tumbuhnya budaya SPIP dalam organisasi; banyak pimpinan organisasi pada OPD yang belum memahami filosofi pengendalian intern dan rendahnya komitmen mereka terhadap pelaksanaan SPIP.

Artikel kedua adalah tentang “Analisis Daya Saing Komoditas Pertanian Dan Bahan Pangan Indonesia Di Pasar Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam”, yang ditulis oleh Iwan Hermawan dari Pusat Penelitian. Perubahan positif dari ekonomi negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor nonmigasnya. Namun perkembangan produksi komoditas pertanian dan bahan pangan justru masih dihadapkan pada isu skala ekonomi usaha terbatas, penurunan bantuan pemerintah hingga risiko perubahan iklim. Resultan kondisi ini akan memengaruhi daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor komoditas pangan dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV tumbuh lebih tinggi selama periode tahun 2001-2016 jika dibandingkan dengan pertumbuhan impornya. Lebih lanjut dari hasil perhitungan dengan menggunakan indeks RTA memberikan gambaran di mana sebagian besar dari komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV memiliki keunggulan perdagangan dan sebagian lainnya tidak memiliki keunggulan tersebut. Potensi pasar CLMV yang besar harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan meningkatkan daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan, termasuk menentukan komoditas pertanian dan bahan pangan yang menjadi prioritasnya.

Tulisan ketiga membahas isu UKM dengan judul “Kebijakan Penyaluran Modal Melalui Koperasi Berbasis Komunitas Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta”, yang ditulis oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi—peneliti ekonomi dari Pusat Penelitian. Koperasi dan UKM merupakan pilar perekonomian nasional yang berperan besar dalam memajukan ekonomi rakyat. UKM sendiri telah terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi dengan tetap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun permasalahan modal masih menjadi masalah utama bagi UKM dalam rangka mengembangkan usaha. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta menunjukkan tren positif, namun di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait persaingan untuk memperoleh bantuan permodalan. Kajian ini memberikan alternatif kebijakan bagi Pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui koperasi berbasis komunitas UKM dengan terlebih dahulu melakukan penyederhaan dan pengurangan jumlah koperasi.

Tulisan keempat ditulis oleh saudara Joko Riskiono dengan judul “Mengevaluasi Dan Menginventarisasi Pelaksanaan Program Legislasi Nasional”. Setiap kali ditetapkan Program Legislasi Nasional lima tahun dan prioritas tahunan selalu menuai perhatian dan kritik publik utamanya terhadap hasil capaian legislasi yang tidak memuaskan hal itu didasari oleh capaian Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan baik secara kualitas menurun bahkan secara kuantitas rendah. Ketidakterhasilan tersebut, harus dilakukan evaluasi dan inventarisasi oleh Badan Legislasi selaku yang bertanggungjawab mengkoordinasi penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional lima tahun dan prioritas tahunan antara

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah. Namun hingga saat ini, terhadap hasil evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kuantitas legislasi dinilai sebagai rutinitas tahunan belum mampu mengembalikan kepercayaan publik dalam menunaikan kewajiban dan tugas legislasi.

Tulisan tentang "*Education System Reform In Indonesia: Progress And Challenges*" yang ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea dari Pusat Penelitian merupakan satu-satunya artikel yang berbahasa Inggris dalam edisi ini. Sistem pendidikan Indonesia sudah beberapa kali direformasi. Sampai saat ini UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai perbaikan sistem pendidikan telah terlaksana dan hampir mencapai tujuan, namun permasalahan dan tantangan untuk membuat pendidikan yang mampu bersaing dengan negara lain harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah maupun Parlemen sebagai pembuat kebijakan. Temuan yang didapat dari kajian ini bahwa Pemerintah diharapkan dapat membuat dasar hukum untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun sehingga dapat dilaksanakan secara nasional. Meskipun program wajib belajar 9 tahun hampir mendekati target, pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih untuk akses pendidikan di daerah terpencil sehingga target dapat dipenuhi 100%. Dalam hal perubahan kurikulum perlu dipikirkan formulasi jangka waktu perubahan antara 5 atau 10 atau 15 tahun. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada guru dengan membuat kebijakan yang membuat guru setia dan fokus akan profesinya.

Tulisan yang terakhir berjudul "*Perfilman Indonesia: Perkembangan Dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya*", yang ditulis oleh Handrini Ardiyanti yang juga peneliti dari Pusat Penelitian. Kebijakan perfilman yang diterapkan negara mempengaruhi perkembangan industri perfilman di negara tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perfilman mempengaruhi perkembangan industri perfilman di suatu negara dapat diketahui antara lain dengan cara melakukan studi sejarah. Karena itu, perlu dilakukan studi sejarah untuk mengetahui sejarah perkembangan perfilman Indonesia. Sejarah perkembangan perfilman tersebut ditelaah dengan konsep-konsep terkait dengan industri budaya. Dari hasil telaah diketahui sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat mendukung perkembangan perfilman Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi tahapan produksi dengan memberikan dukungan maksimal bagi tumbuh berkembangnya sekolah film, membantu permodalan dengan sistem fund to funds, memperbaiki kebijakan sensor yang mempertimbangkan proses produksi film, mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan tumbuh berkembangnya konsep bioskop komunitas, mendukung promosi film Indonesia dengan melibatkan berbagai komponen pemerintahan lainnya dibawah koordinasi Badan Ekonomi Kreatif, dan menumbuhkembangkan kebanggaan pada film Indonesia melalui strategi ekspansi budaya.

Demikianlah keenam karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan Juni 2017. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Munajat, PhD; Prof. Dr. Dwi Purwoko; Dr. Y. B. Suhartoko, S.E., M.E; Prof. Dr. Ir. I Wayan Rusastra, M.S.; Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si; dan Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Juni 2017

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Venti Eka Satya (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PENERAPAN DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI YOGYAKARTA

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 85 - 97

Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Laporan keuangan Daerah DI Yogyakarta (DIY) telah lima kali berturut-turut (2011-2015) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Daerah DIY pada tahun 2015 memperoleh nilai tertinggi (80,68) dengan predikat A. Aparat pengawasan intern pemerintah DIY juga berada pada level maturitas 3. Indonesia. Dalam penelitian ini dianalisis penerapan SPIP pada pemerintahan DIY serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemda DIY sudah merintis pelaksanaan sistem pengendalian intern sejak 2005. Pengendalian internal pemerintah daerah sudah menjadi komitmen Gubernur DIY sejak mencanangkan Reformasi Total pada 1998/1999. Pemerintah DIY sangat memahami pentingnya SPIP. Pemerintah DIY menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa aturan turunan yang relevan. Pemda DIY telah berhasil menerapkan SPIP di lingkungan organisasinya hal ini terlihat dari nilai LAKIP, opini atas Laporan Keuangan serta jawaban kuesioner dari penerliti. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SPIP adalah rendahnya kompetensi SDM dan kurangnya komitmen terhadap kompetensi SDM; kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SPIP dan belum tumbuhnya budaya SPIP dalam organisasi; banyak pimpinan organisasi pada OPD yang belum memahami filosofi pengendalian intern dan rendahnya komitmen mereka terhadap pelaksanaan SPIP.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Audit Laporan Keuangan, Laporan Keuangan, Lingkungan Pengendalian, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO.

ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN DAN BAHAN PANGAN INDONESIA DI PASAR KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 99 - 115

Perubahan positif dari ekonomi negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor nonmigasnya. Namun perkembangan produksi komoditas pertanian dan bahan pangan justru masih dihadapkan pada isu skala ekonomi usaha terbatas, penurunan bantuan pemerintah hingga risiko perubahan iklim. Resultan kondisi ini akan memengaruhi daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV melalui aktivitas perdagangan. Pendekatan penelitian menggunakan indeks Relative Trade Advantage (RTA). Sedangkan data sekunder bersumber dari Comtrade, World Integrated Trade Solution, International Monetary Fund, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pertanian. Periode analisis data mencakup rentang tahun 2001-2016 dengan pertimbangan tertentu. Subjek komoditas perdagangan yang dianalisis menggunakan Harmonized Sections (HS) tahun 2012 dua digit, yaitu HS 01-24 sebagai kelompok komoditas pertanian dan bahan pangan. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor komoditas pangan dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV tumbuh lebih tinggi selama periode tahun 2001-2016 jika dibandingkan dengan pertumbuhan impornya. Lebih lanjut dari hasil perhitungan dengan menggunakan indeks RTA memberikan gambaran di mana sebagian besar dari komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV memiliki keunggulan perdagangan dan sebagian lainnya tidak memiliki keunggulan tersebut. Potensi pasar CLMV yang besar harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan meningkatkan daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan, termasuk menentukan komoditas pertanian dan bahan pangan yang menjadi prioritasnya.

Kata Kunci: komoditas pertanian, bahan pangan, CLMV, daya saing, indeks RTA.

KEBIJAKAN PENYALURAN MODAL MELALUI KOPERASI BERBASIS KOMUNITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 117 - 127

Koperasi dan UKM merupakan pilar perekonomian nasional yang berperan besar dalam memajukan ekonomi rakyat. UKM sendiri telah terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi dengan tetap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun permasalahan modal masih menjadi masalah utama bagi UKM dalam rangka mengembangkan usaha. Kajian ini akan membahas permasalahan modal serta solusi kebijakan yang dapat diambil Pemerintah dengan memanfaatkan keberadaan koperasi berbasis komunitas UKM yang ada di Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian bantuan modal. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis naratif terhadap data yang diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan di Kota Surakarta pada bulan Agustus 2016. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta menunjukkan tren positif, namun di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait persaingan untuk memperoleh bantuan permodalan. Kajian ini memberikan alternatif kebijakan bagi Pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui koperasi berbasis komunitas UKM dengan terlebih dahulu melakukan penyederhaan dan pengurangan jumlah koperasi.

Kata kunci: Koperasi, UKM, Komunitas, Modal.

MENGEVALUASI DAN MENGINVENTARISASI PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 129 - 149

Setiap kali ditetapkan Program Legislasi Nasional lima tahun dan prioritas tahunan selalu menuai perhatian dan kritik publik utamanya terhadap hasil capaian legislasi yang tidak memuaskan hal itu didasari oleh capaian Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan baik secara kualitas menurun bahkan secara kuantitas rendah. Ketidakberhasilan tersebut, harus dilakukan evaluasi dan inventarisasi oleh Badan Legislasi selaku yang bertanggungjawab mengkoordinasi penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional lima tahun dan prioritas tahunan antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah. Namun hingga saat ini, terhadap hasil evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kuantitas legislasi dinilai sebagai rutinitas tahunan belum mampu mengembalikan kepercayaan publik dalam menunaikan kewajiban dan tugas legislasi.

Kata kunci: evaluasi, inventarisasi, prolegnas.

PEMBARUAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 151 - 162

Sistem pendidikan Indonesia sudah beberapa kali direformasi. Sampai saat ini UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai perbaikan sistem pendidikan telah terlaksana dan hampir mencapai tujuan, namun permasalahan dan tantangan untuk membuat pendidikan yang mampu bersaing dengan negara lain harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah maupun Parlemen sebagai pembuat kebijakan. Tulisan ini akan membahas dua permasalahan pokok yakni pencapaian apa yang didapat dari beberapa kali reformasi sistem pendidikan di Indonesia dan permasalahan dan tantangan apa yang masih terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia serta pilihan kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Tulisan ini hasil dari studi pustaka. Pertama, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan sebagai dasar analisis. Kedua, menggunakan data sekunder kualitatif dan kuantitatif dari sumber nasional dan internasional. Ketiga, konsultasi dengan supervisor. Temuan yang didapat dari kajian ini bahwa Pemerintah diharapkan dapat membuat dasar hukum untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun sehingga dapat dilaksanakan secara nasional. Meskipun program wajib belajar 9 tahun hampir mendekati target, pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih untuk akses pendidikan di daerah terpencil sehingga target dapat dipenuhi 100%. Dalam hal perubahan kurikulum perlu dipikirkan formulasi jangka waktu perubahan antara 5 atau 10 atau 15 tahun. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada guru dengan membuat kebijakan yang membuat guru setia dan fokus akan profesinya.

Kata Kunci: reformasi sistem pendidikan, pencapaian sistem pendidikan Indonesia, dan kebijakan sistem pendidikan.

PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN, SEBUAH TELAAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 153 - 179

Kebijakan perfilman yang diterapkan negara mempengaruhi perkembangan industri perfilman di negara tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perfilman mempengaruhi perkembangan industri perfilman di suatu negara dapat diketahui antara lain dengan cara melakukan studi sejarah. Karena itu, perlu dilakukan studi sejarah untuk mengetahui sejarah perkembangan perfilman Indonesia. Sejarah perkembangan perfilman tersebut ditelaah dengan konsep-konsep terkait dengan industri budaya. Dari hasil telaah diharapkan dapat diketahui kebijakan yang dapat mendorong perkembangan industri perfilman Indonesia. Dari hasil telaah diketahui sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat mendukung perkembangan perfilman Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi tahapan produksi dengan memberikan dukungan maksimal bagi tumbuh berkembangnya sekolah film, membantu permodalan dengan sistem fund to funds, memperbaiki kebijakan sensor yang mempertimbangkan proses produksi film, mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan tumbuh berkembangnya konsep bioskop komunitas, mendukung promosi film Indonesia dengan melibatkan berbagai komponen pemerintahan lainnya dibawah koordinasi Badan Ekonomi Kreatif, dan menumbuhkembangkan kebanggaan pada film Indonesia melalui strategi ekspansi budaya.

Kata Kunci: Film, Industri Perfilman, Industri Budaya, Industri Kreatif.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Venti Eka Satya (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

IMPLEMENTATION AND PERSPECTIVE OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) IN DI YOGYAKARTA

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, pp. 85-97

Government Regulation Number 60/2008 on Government Internal Control System (SPIP) states that an accountable and transparent local financial management system can be achieved if all regional leaders control activities in an orderly, controlled, effective and efficient manner. The financial statements of DI Yogyakarta (DIY) have been five times in a row (2011-2015) obtaining Unqualified opinion (WTP) from BPK RI. The Government Institution Accountability Report (LAKIP) of DIY Region in 2015 earned the highest score (80.68, predicate A). The internal government supervision apparatus DIY government is also at maturity level 3. This study analyze application of SPIP on of DIY and constraints faced. This study used descriptive qualitative method. The DIY government has pioneered internal control system implementation since 2005. Local government's internal control has been the commitment of DIY's Governor since the declaration of the Total Reform in 1998/1999. DIY government deeply understands the importance of SPIP, it was following up by issuing some relevant derivative rules. DIY has succeeded in implementing SPIP in its organization, it is showed by the score got in LAKIP, the opinion on Financial Statements and the answers of questionnaires from researcher. Constraints faced in the implementation of SPIP is low competence of human resources and lack of commitment on competence of human resources; lack of understanding of Regional Device Organization (OPD) on SPIP and lack of SPIP culture in organization; many leaders of organizations in OPD have not understood the philosophy of internal control and low commitment to SPIP implementation.

Keywords: Internal Control System, Financial Report Auditing, Financial Report, Environmental Control, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

A COMPETITIVENESS ANALYSIS OF INDONESIAN AGRI-FOOD PRODUCTS IN THE CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, AND VIETNAM MARKET

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, pp. 99-115

The improvements of Cambodians, Laos, Myanmar, and Vietnam (CLMV) economic have opened opportunities for expanding Indonesian non-oil and gas export market. However, the development of agri-food production is still faced with the issue of economies of scale limited, reduction of government intervention, and climate change risks. Responding to this condition, the purpose is to analyze the competitive advantages and disadvantages of Indonesia's agri-food products on CLMV market through trading activities. Relative Trade Advantage (RTA) index approach is applied to assess the competitiveness. Required secondary data provided by Comtrade, World Integrated Trade Solution, International Monetary Fund, National Bureau of Statistics, Bank Indonesia, Indonesia Investment Coordinating Board, and Ministry of Agriculture. While the analysis period covers time series data from year 2001-2016. The subject of trade commodities based on international nomenclature for the classification of products Harmonized Sections (HS) 2012 in two digits. Agricultural products belong in HS 01-24, which for agricultural commodities is in HS 01-15 and foodstuffs is in HS 16-24. The results revealed that export of Indonesia's agri-food products on CLMV market grew higher during 2001-2016 period compared to imports. Through RTA index, it is known that most of Indonesia's agri-food products have the revealed trade advantages while others do not have revealed trade advantages on CLMV market. CLMV's huge market potential remains wide open and this should be able to be utilized by improving its competitiveness of agri-food products, determining which agri-food products to prioritize developed.

Keywords: agri-food products, CLMV, competitiveness, RTA index

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

CAPITAL DISTRIBUTION POLICY THROUGH SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES COMMUNITY-BASED COOPERATIVE IN SURAKARTA

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, pp. 117-127

Cooperatives and SMEs are the pillar of the national economy and play major role in advancing the people's economy. SMEs themselves have proven to be able to survive the economic downturn while still providing jobs for the community. However, capital issues are still a major problem for SMEs in order to develop the business. This review discuss capital issues and policy solutions that can be taken by the Government to take advantage of the existence of a SMEs community based cooperative in Surakarta in order to improve the effectiveness of the provision of the capital. The study uses narrative analysis to data obtained through research conducted in Surakarta in August 2016. The results of this study indicate that the development of SMEs community-based cooperatives in Surakarta showed a positive trend, but on the other hand these developments also pose competition problems related to obtaining capital assistance. This study provides policy alternatives for the Government to channel aid through SMEs community based cooperative. However, Government first need to simplify and to reduce the number of cooperatives.

Keywords: : Cooperative, SME, Community, Capital.

EVALUATING AND INVENTORING THE PROGRAM OF NATIONAL LEGISLATION

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, pp. 129 - 149

Determination of the preparation on National Legislation Program or the medium-term five-year period 2015-2019 reap attention and public criticism of the result of performance unsatisfactory legislation , based on the draft bill produced both in quality and in quantity decreased low. To that must be evaluated and inventory of Bill incoming National Legislation Program five-year and annual reports compiled between the House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Government is coordinated by the Legislative Board as fittings that are fixed and specific charge of legislation obliged to evaluate and inventory the National legislation Program, following the development of the discussion, and monitoring and review of the legislation with the results able to restore public confidence in fulfilling the obligation and duty legislation.

Keywords: evaluation, inventory, national legislation medium-term program.

EDUCATION SYSTEM REFORM IN INDONESIA: PROGRESS AND CHALLENGES

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, pp. 151 - 162

Education system in Indonesia has been reformed several times. Currently, the Law No. 20 Year 2003 on National Education System is the legal basis of the implementation of education system in Indonesia. There are several improvements of education system in Indonesia that almost reached the goal, but the problems and challenges should get more attention from the Government and the Parliament as policy makers. The present article addresses two main questions: What were the main achievements of education reform in Indonesia? and What are the problems and challenges of education system in Indonesia. This paper is the result of library research. First, it explores the existing laws relating to Indonesia's education system as a starting point. Second, it uses available quantitative and qualitative secondary data from national and international sources. Third, it draws on consultation meetings with supervisors. The findings obtained from this study are that the government has expected to create the legal basis for running the 12-year compulsory program so it can be implemented nationally. Thus, although the 9-year compulsory program is almost close to the target, the government can give increased attention to access to education in remote areas so that the target can be met 100%. In terms of curriculum change, it needs to consider the formulation of a period of change between 5 or 10 or 15 years. The government needs to give attention to the teacher to create policies that make them be faithful and love their profession.

Keywords: reform of education system, achievement of Indonesia's education system, and education system policy.

CINEMA IN INDONESIA: HISTORY AND GOVERNMENT REGULATION, A CULTURAL INDUSTRY PERSPECTIVE

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, pp. 153 - 179

Law of cinema' believed that it was important to increase the film industry. To find out how the film policy affect the development of film industry in a country can be known, among others, by doing a history study. Therefore, it is necessary to studies the history of film development of the Indonesia Film Industries. The history of Indonesia Film Industris then explored with concepts related to the culture industry. From the results of the study is expected to be known policies that can encourage the development of the Indonesian film industries. From the results of the study is known the number that is expected to support the development of Indonesian film. Production policy by providing support for the development of film schools, help the producers film get the access to capital with fund to funds system, improving censorship sensors that adopt the film production process, encouraging the existence of policies that allow the development of the concept of community cinema, supporting the promotion of Indonesian films with various other forms of government under the coordination of the Creative Economic Agency, and Cultivate pride in Indonesian films through an improved cultural strategy

Keywords: cinema, cinema industries, popular culture, creative industries
